

Pengaruh Implementasi SPIP terhadap Penatausahaan Aset Tetap serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

The Effect Of SPIP Implementation on the Administration of Fixed Assets and Its Implication to The Quality Of Financial Reports (Survey on SKPD in West Bandung Regency Government)

Alya Dhiya Fauzan

Program Studi D-4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: alya.dhiya.amp17@polban.ac.id

Iyeh Supriatna

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: iyeh.supriatna@polban.ac.id

Hastuti

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: hastuti@polban.ac.id

Abstract: *There are still many shortcomings in the administration of fixed assets in the West Bandung Regency Government. This will have an impact on the financial reports it produces. Therefore, supporting factors are needed so that the administration of fixed assets can run well and in accordance with applicable regulations, a Government Internal Control System (SPIP) is needed. SPIP aims to provide adequate assurance for the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safeguarding state assets, and compliance with laws and regulations. The purpose of this study was to examine the effect of SPIP on fixed asset administration and its implications for the quality of financial Reports. The population in this study were all SKPD in the West Bandung Regency Government with a sample of 28 SKPD. Sources of data used are primary data obtained directly from the results of distributing questionnaires. The research method used is survey research with a quantitative descriptive approach. The analytical method used is path analysis and Sobel test. The results showed that directly, SPIP had a positive and significant effect on the administration of fixed assets, the administration of fixed assets had a positive and significant effect on the quality of financial reports, SPIP had a positive and significant effect on the quality of financial reports. Indirectly, SPIP has a positive and significant effect on the quality of financial reports through the administration of fixed assets.*

Keywords: *SPIP, Fixed Assets Administration, Quality of Financial Reports*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) guna mengurus daerahnya masing-masing sehingga pengelolaan keuangan sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Salah satu wewenangnya ialah pengelolaan sumber daya, termasuk pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah secara optimal yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku (Asman et al., 2016). Pengelolaan aset daerah merupakan serangkaian aktivitas mulai dari tahap perencanaan kebutuhan serta penganggaran, hingga tahap pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pada penelitian ini akan berfokus pada tahap penatausahaan karena telah ditemukan berbagai masalah terkait penatausahaan khususnya di Pemda KBB. Penatausahaan terdiri dari pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Tujuannya yakni agar memperoleh informasi tentang kondisi aset tetap yang nantinya dijadikan sebagai *database* untuk menghasilkan laporan aset daerah pada neraca di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai pihak yang diberikan kewenangan, maka Pemerintah Daerah harus memberikan pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk LKPD atas penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan seluruh masyarakat. Selain itu juga, penatausahaan aset tetap digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pimpinan di Pemerintahan, oleh karenanya dibutuhkan LKPD memiliki kualitas yang baik.

Menurut Sudiarianti, dkk (2015), “Agar dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan peran dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”. SPIP artinya proses integral pada tindakan serta aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta pegawainya. Tujuan dari SPI yaitu menghasilkan kegiatan yang efektif serta efisien, keandalan LKPD, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terdapat masalah utama dalam LKPD yang mempengaruhi opini yaitu terkait kelemahan SPIP. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Pemda yang memiliki kelemahan dalam pelaksanaan SPIP. Selain itu dalam LHP BPK terkait LKPD KBB Tahun Anggaran 2019 masih memiliki banyak masalah terkait penatausahaan aset, seperti pencatatan aset pada KIB, kodefikasi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta sertifikasi tanah yang belum optimal.

Pada data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB diketahui dari 1.444 bidang aset, hanya 26 bidang yang memiliki sertifikat. Selain itu terdapat sengketa lahan Pasar Panorama Lembang yang pada akhirnya harus ganti rugi sebesar Rp 116.185.000,- (Dara.co.id, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum tertib administrasi asetnya. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai, **“Pengaruh Implementasi SPIP terhadap Penatausahaan Aset Tetap serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan”**.

2. Kajian Pustaka

2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian SPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yakni “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Selain itu dijelaskan juga bahwa “unsur-unsur SPI yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Intern”.

2.2. Penatausahaan Aset Tetap

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan “penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Pembukuan merupakan kegiatan pencatatan aset daerah ke dalam daftar barang berdasarkan penggolongan serta kodefikasi. Inventarisasi merupakan aktivitas pendataan, pencatatan serta pelaporan aset daerah. Pelaporan merupakan suatu kegiatan penyusunan dan penyampaian data terkait aset daerah.

2.3. Kualitas Laporan Keuangan

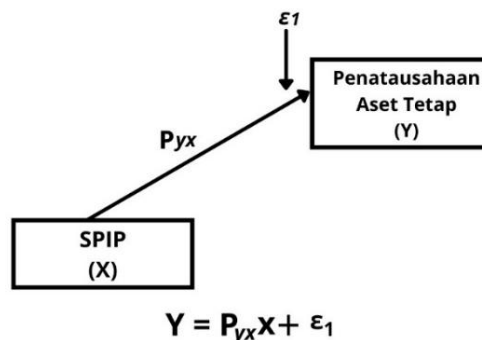
Pengertian kualitas menurut Mulyana (2010:94) merupakan “kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan pengertian “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Dari paparan tersebut maka dapat diperoleh pengertian kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi pada suatu periode yang dibuat sesuai dengan SAP dan dapat menyajikan informasi keuangan yang dapat dipahami dan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Sesuai dengan Peraturan tersebut, “karakteristik kualitatif dari Laporan Keuangan Pemerintah yaitu terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami”.

3. Metode Penelitian

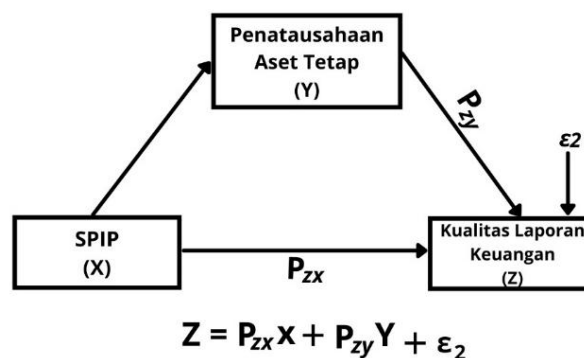
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif pada Pemda KBB. Seluruh SKPD dijadikan sebagai populasi dengan sampel sebanyak 28 SKPD. Sumber data yang dipakai yaitu data primer yang didapatkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner.

3.1 Metode Analisis

Pengujian validitas, reliabilitas, dan analisis deskriptif ialah metode analisis data yang perlukan pada tahap awal. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah model dalam penelitian ini layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Setelah diketahui bahwa model penelitian ini layak digunakan selanjutnya dilakukan analisis jalur (*path analysis*) dan uji sobel untuk menguji hipotesis. Berikut ini gambar substruktur 1 dan substruktru 2 yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel.



Gambar 1. Substruktur Pertama



Gambar 2. Substruktur Kedua

Selanjutnya, untuk menguji pengaruh tidak langsung maka dilakukan uji sobel. Terdapat 2 tahap perhitungan dalam uji sobel.

Berikut ini rumus untuk tahap pertama yaitu perhitungan *standar error* dari koefisien *indirect effect*.

$$(Sp_{yx}p_{zy}) = \sqrt{p_{zy}^2Sp_{yx}^2 + p_{yx}^2Sp_{zy}^2 + Sp_{yx}^2Sp_{zy}^2}$$

Keterangan :

p_{yx} : Koefisien *direct effect* variabel X terhadap variabel Y

p_{zy} : Koefisien *direct effect* variabel Y terhadap variabel Z

Sp_{yx} : *Standard error* koefisien p_{yx}

Sp_{zy} : *Standard error* koefisien p_{zy}

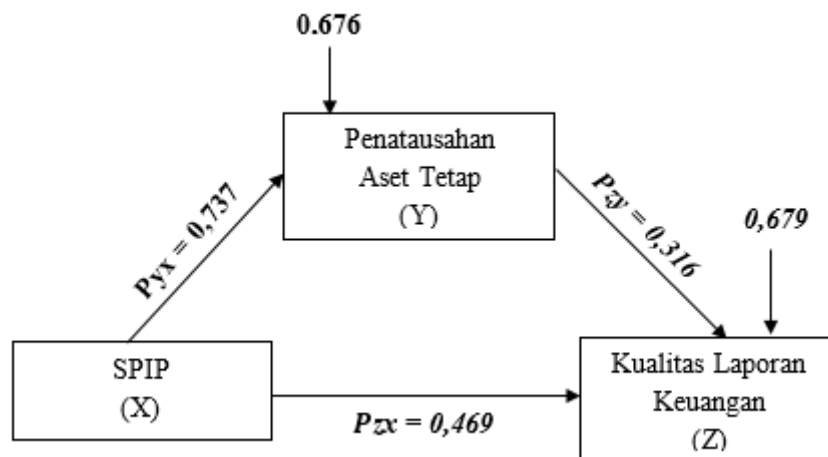
Berdasarkan hasil perhitungan standar error di atas, maka dilakukan perhitungan t statistik dengan rumus berikut ini.

$$t = \frac{p_{yx}p_{zy}}{Sp_{yx}p_{zy}}$$

Kemudian, hasil dari t_{hitung} di atas dibandingkan pada nilai t_{tabel} . Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil perhitungan analisis jalur pada penelitian ini antara lain:



Gambar 3. Hasil Analisis Jalur

Berdasarkan Gambar 3 maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

a) Persamaan Substruktur Pertama

$$Y = p_{yx}X + \varepsilon_1 \text{ atau } Y = 0,737X + 0,676\varepsilon_1$$

b) Persamaan Substruktur Kedua

$$Z = p_{zx}X + p_{zy}Y + \varepsilon_2 \text{ atau } Z = 0,467X + 0,316Y + 0,679\varepsilon_2$$

4.1 Identitas Responden secara Umum

Di bawah ini adalah identitas responden secara umum yang dibagi menjadi lima karakteristik antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identitas Responden secara Umum

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1.	Berdasarkan Jabatan		
	Sekretaris SKPD	23	29%
	Kasubag Keuangan	27	35%
	Bendahara Barang	28	36%
	Jumlah	78	100%
2.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Pria	53	68%
	Wanita	25	32%
	Jumlah	78	100%
3.	Berdasarkan Usia		
	Kurang dari 25 tahun	1	1%
	25- 35 tahun	20	26%
	36 - 45 tahun	33	42%
	46 - 55 tahun	17	22%
	Lebih dari 55 tahun	7	9%
	Jumlah	78	100%
4.	Berdasarkan Pendidikan Terakhir		
	SMA	6	8%
	Diploma III	6	8%
	Diploma IV atau S1	30	38%
	S2	36	46%
	S3	0	0%
		Jumlah	78
5.	Responden Berdasarkan Lama Bekerja		
	Kurang dari 2 tahun	19	24%
	2- 5 tahun	29	37%
	Lebih dari 5 tahun	30	38%
	Jumlah	78	100%

4.2 Pengaruh SPIP terhadap Penatausahaan Aset Tetap

Sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan pada variabel SPIP terhadap penatausahaan aset tetap, diperoleh $t_{hitung} 9,495 > t_{tabel} 1,991$ artinya terdapat pengaruh positif antar variabel menggunakan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ artinya signifikan, sehingga dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Selanjutnya, diketahui nilai koefisien jalur dari variabel SPIP terhadap variabel penatausahaan aset tetap sebanyak 0,737 dan berarah positif. Besarnya pengaruh SPIP terhadap penatausahaan aset tetap di Pemda KBB sebanyak 54,3%, sedangkan sisanya sebanyak 45,7% dipengaruhi variabel lain.

Pada hasil penyebaran kuesioner, kelima indikator SPIP memiliki pengaruh yang sangat baik dalam implementasinya di Pemda KBB. Upaya yang telah dilakukan Pemda KBB dalam memperkuat SPIP agar dapat meningkatkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap adalah dengan menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat, pencatatan dengan tepat waktu dan akurat, melaksanakan revidi atas kinerja agar pelaksanaan penatausahaan aset terus mengalami peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi audit dari BPK.

4.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sesuai dengan hasil pengujian pada variabel penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan, diperoleh $t_{hitung} 2,728 > t_{tabel} 1,991$ artinya terdapat pengaruh positif antar variabel menggunakan nilai Sig. $0,008 < 0,05$ artinya, sehingga dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Selanjutnya, diketahui nilai koefisien jalur dari variabel penatausahaan aset tetap terhadap

kualitas laporan keuangan sebanyak 0,316 dan berarah positif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada variabel penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan, sebanyak 0,737 dan berarah positif. Besarnya pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan di Pemda KBB sebanyak 10%, sedangkan sisanya sebanyak 90% dipengaruhi variabel lain.

Sesuai hasil analisis deskriptif, ketiga indikator penatausahaan aset tetap memiliki pengaruh yang sangat baik dalam penerapannya di Pemda KBB. Indikator pembukuan menjadi indikator yang paling besar pengaruhnya dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap, hal tersebut memperlihatkan bahwa para pegawai instansi Pemda KBB telah melakukan kegiatan pencatatan aset ke dalam daftar barang sesuai dengan peraturan pemerintah.

4.4 Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan pada variabel SPIP terhadap kualitas laporan keuangan, diperoleh $t_{hitung} 4,050 > t_{tabel} 1,991$ artinya terdapat pengaruh positif antar variabel menggunakan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ artinya signifikan, sehingga dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Selanjutnya, diketahui nilai koefisien jalur dari variabel SPIP terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebanyak 0,469 dan berarah positif. Besarnya pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemda KBB sebanyak 22%, sedangkan sisanya sebanyak 78% dipengaruhi variabel lain.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda KBB dalam meningkatkan penerapan SPIP agar meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu dengan melaksanakan pembinaan SDM yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, melakukan reviu atas kinerja terkait penyusunan laporan keuangan, dan telah memastikan bahwa hasil audit serta rekomendasi audit segera ditindaklanjuti.

4.5 Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penatausahaan Aset Tetap

Sesuai dengan pengujian yang dilakukan pada variabel SPIP terhadap kualitas laporan keuangan melalui penatausahaan aset tetap, diperoleh $t_{hitung} 2,67 > t_{tabel} 1,991$ artinya terdapat pengaruh positif antar variabel menggunakan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ artinya signifikan sehingga dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Selanjutnya, diketahui nilai koefisien jalur dari variabel SPIP terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebanyak 0,702 dan berarah positif. Besarnya pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemda KBB sebanyak 49,3%, sedangkan sisanya sebanyak 50,7% dipengaruhi variabel lain.

Pemda KBB telah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kecermatan dalam memperoleh bukti transaksi, pengawasan aset daerah, dan peran internal auditor (Inspektorat) yang lebih luas dan intensif untuk meningkatkan penerapan SPIP agar salah satu tujuan dari SPIP yaitu tertib administrasi aset melalui penatausahaan aset tetap dapat dilaksanakan dengan sesuai ketentuan sehingga hal ini dapat menaikkan kualitas LKPD yang dihasilkan oleh Pemda KBB.

Penelitian ini mendukung penelitian Trisnani, dkk (2018) dan Fazlurahman, dkk (2021) yang menyebutkan bahwa variabel SPIP memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan melalui penatausahaan aset tetap. Hal ini berarti apabila implementasi SPIP dilakukan dengan benar maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan dengan didukung penatausahaan aset tetap yang baik.

5. Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan pembahasan yang sudah di paparkan, maka penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Variabel SPIP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel penatausahaan aset tetap di Pemda KBB. Artinya, semakin baik implementasi SPIP maka akan semakin baik pula pelaksanaan pada penatausahaan aset tetap.
2. Variabel Penatausahaan aset tetap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan di Pemda KBB. Artinya, semakin baik implementasi SPIP maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.
3. Variabel SPIP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan di Pemda KBB. Artinya, semakin baik implementasi pada SPIP maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.
4. Variabel SPIP berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel kualitas laporan keuangan melalui penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening. Artinya, implementasi pada SPIP yang sesuai maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel yang memediasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa saran untuk Pemda KBB antara lain:

1. Inspektorat KBB diperlukan memperbanyak kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) pada semua SKPD sehingga diharapkan Pemda dapat terus memperbaiki implementasi SPIP yang sesuai dengan ketentuan.
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diperlukan untuk menambah kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada pegawai dari seluruh SKPD agar memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam penatausahaan aset tetap serta penyelesaian LKPD
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diperlukan untuk melakukan pembukuan atas seluruh aset serta melakukan inventarisasi aset tetap satu tahun sekali atau sekurang-kurangnya dalam 5 tahun sekali. Hal ini agar Pemda KBB tidak mengalami lagi pengambilalihan aset oleh pihak tidak bertanggungjawab.
4. Dilihat dari skor terendah variabel kualitas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tak selalu tepat waktu pada menuntaskan laporan keuangan. Oleh sebab itu diharapkan para pegawai pada Pemda KBB dapat disiplin waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan agar tidak menghambat di pekerjaan yang lainnya.

References

- Asman, A., Akram, A., & Alamsyah, M. T. (2016). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 23–38.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019*.
- Dara.co.id. (2021). *Soal Pasar Panorama, Pemkab Bandung Barat Harus Bayar Ganti Rugi, Dewan Menilai Itulah Akibat Lalai Tangani Sengketa*. <https://www.dara.co.id/soal-pasar-panorama-pemkab-bandung-barat-harus-bayar-ganti-rugi-dewan-menilai-itulah-akibat-lalai-tangani-sengketa.html>
- Fazlurahman, F., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). *Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening (Studi pada BPKA Kota Bandung)*. 12(2), 250–265.
- Mulyana Deddy, M.A., P. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*. Sekretariat Negara.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Bisma*, 11(3), 271. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6470>